



PKL Kotabaru Kukuh Bertahan

YOGYA, TRIBUN - Belasan pedagang kaki lima (PKL) Jalan Abu Bakar Ali tegas menolak digusur. Sampai tenggat waktu, mereka akan tetap bertahan berjualan di sisi selatan Gereja St. Antonius Kotabaru tersebut.

Koordinator Komite Perjuangan PKL Anti-Pengusuran (KPKP), Agung Wibowo Budiono mengatakan, hingga hari terakhir jelang tenggat waktu yang diberikan, pihaknya tidak menemui adanya kata sepakat. Dia menilal, pengusuran masih tidak jelas alasannya.

"Kita tetap bertahan kalau tidak ada solusi. Karena sampai saat ini tidak tuntas dan kami tidak ada pelanggaran Perda yang signifikan," ujar Agung, Jumat (29/9).

Ia juga menampik adanya tawaran relokasi di Jalan Ahmad Jazuli atau sisi selatan Masjid Syuhada. Menurutnya, saat pertemuan terakhir dengan pihak Pemkot Yogyakarta melalui Satpol PP, tidak ada kesepakatan terkait relokasi.

"Itu lokasi mati, jarang dilewati orang. Selain itu tempatnya juga tidak cukup untuk menampung kita semua yang digusur," jelasnya.

Agung menyebut, ada sebanyak 16 pedagang terdampak pengusuran yang direncanakan hari ini, Sabtu (30/9). Adapun pedagang di sisi timur Gereja Kotabaru sebanyak 10 pedagang tidak turut digusur. Hal tersebut yang membuat Agung dan kawan-kawan merasa tidak adil.

"Jangan ada diskriminasi, harus adil semuanya. Karena kita semua sama-sama sudah hidup bersama sejak lama. Pokoknya kita tetap bertahan bila tidak ada koordinasi maupun kejelasan dari Pemkot," tegas Agung.

Bantah pungutan

Camat Gondokusuman, Jalaludin, menegaskan bahwa sosialisasi dan tawaran relokasi telah diberikan kepada para PKL Jalan Abu Bakar Ali. Selain itu, ia juga membantah adanya pungutan retribusi dari pihak Kecamatan.

"Kita tidak mengusur semena-mena, kita sudah siapkan relokasi di selatan Masjid Syuhada dan di Jalan Ahmad Jazuli," ujar dia.

● ke halaman 14



BERJUALAN - Para PKL Jalan Abu Bakar Ali tetap berjualan pada Jumat (29/9). Sesuai tenggat waktu dari Satpol PP Kota Yogyakarta, mereka akan digusur dan direlokasi ke Jalan Ahmad Jazuli, hari ini.

TRIBUN JOGJA/IKRAR GILANG

**PKL Kotabaru
Kukuh Bertahan**

● Sambungan Hal 13

Terkait pengusuran, Jalaludin mengaku baru akan melakukan kepada PKL di sisi barat Jalan Abu Bakar Ali (selatan Gereja Kotabaru), yakni PKL helm dan aksesoris. Sedangkan PKL sisi timur yakni pedagang makanan rencananya akan digusur setelahnya dan direlokasi ke Taman Segara Amarta, dekat Jembatan Kleringan.

Selain itu, Jalaludin juga membantah adanya pungutan retribusi. Sebelumnya pedagang mengaku telah membayar rutin retribusi sampah sebesar Rp7.500 dan parkir sebesar Rp40.000 setiap bulannya.

"Tidak benar itu, kami dari kecamatan tidak pernah menarik retribusi sampah dan parkir ke PKL," jelasnya.

Mendampingi

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) UII akan mendampingi dan membela para PKL di barat Gereja St. Antonius yang akan digusur hari ini. LKBH juga telah melayangkan beberapa surat ke pihak Satpol PP Kota Yogyakarta, Kamis (28/9).

Agung Wijaya Wardhana SH, tim advokasi PKL dari LKBH UII menuturkan, rencana pengusuran tersebut tidak berdasar dan menurutnya dilakukan tiba-tiba. Para PKL di sebelah barat Gereja tersebut hanya diberi undangan nomor 005/6/2 yang dikeluarkan Pemkot Yogyakarta mengenai rapat koordinasi pemasalahan PKL di Jalan Abu Bakar Ali.

"Rencana pengusuran itu tidak berdasar, sehingga kami berkewajiban untuk membela para PKL yang akan digusur. PKL diminta untuk mengosongkan lapak mulai Sabtu besok (hari ini). Pemberitahuan sebelumnya juga tidak ada, perintah itu juga terkesan tidak jelas,"

katanya.

Pihaknya juga merasa jika pun dilakukan pengusuran, seharusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu, sebelum-sebelumnya para PKL juga tidak membuat masalah di daerah tersebut, bahkan memiliki izin penggunaan lokasi yang legal. Walaupun sejak 2014 tidak diperpanjang karena dipersulit oleh pihak Kecamatan Gondokusuman.

Menurut Agung, berdasarkan lampiran I nomor 10 peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 45 tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta dan nomor 26 tahun 2002 tentang PKL dijelaskan, bahwa tidak ada larangan bagi para PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya di trotoar Jalan Abu Bakar Ali. Baik di sisi utara mau pun selatan.

Selain itu, pengusuran yang dilakukan pemkot Yogyakarta dinilai telah melanggar Undang-undang dasar 1945. "Pengusuran yang dilakukan pemkot sejatinya melanggar pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur hak warga negara untuk memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara sesungguhnya punya kewajiban melindungi mata pencaharian warganya tak terkecuali PKL," jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya selaku kuasa hukum para PKL telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta. Pihaknya juga menginginkan adanya mediasi antara para PKL dengan pihak Pemkot.

"Kami sudah layangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Pol PP mengenai pengusuran itu. Karena banyak kejangalan seperti tidak ada dasar hukum, dan tidak ada kejelasan mengenai alasannya apa. Kami juga ingin adanya mediasi antara PKL dan Pemkot," ungkapnya.

Jika nantinya Pemkot

dapat membuktikan dasar pengusuran tersebut, pihaknya tidak akan berhenti. Rencananya jika hal tersebut terwujud, pihaknya akan meminta perlindungan ke Gubernur DIY.

"Kalau nantinya pemkot bisa buktikan punya dasar yang jelas untuk mengusur, PKL tetap kami dampingi. Nantinya kami akan minta perlindungan hukum ke Gubernur dan DPRD Kota Yogyakarta. Kami harap pemkot melindungi warganya, karena PKL mestinya dipupuk dan dibina, bukannya dimatikan keberadaannya," tukasnya.

Klaim sepakat

Kasi Pengendalian Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santoso mengatakan, pihaknya memang telah mengadakan rapat dengan belasan PKL yang berada di Jalan Abu Bakar Ali, Kota baru beberapa waktu lalu. Hasil dari rapat tersebut, para PKL telah bersedia pindah dihitung mulai Sabtu (30/9).

"Memang kami telah mengundang 13 pedagang untuk rapat mengenai pengosongan lapak di Jalan Abu Bakar Ali. Dari hasil kesepakatan bersama juga, para PKL memilih untuk dipindah di utara gereja," katanya, Kamis (28/9).

Lanjutnya, pengosongan lapak di sepanjang Jalan tersebut dilakukan karena para PKL sudah tidak mengantongi izin berdagang di daerah tersebut. Ditambah lagi, karena banyaknya kendaraan yang parkir di daerah tersebut membuat Jalan Abu Bakar Ali menjadi padat dan kerap menimbulkan antrian panjang kendaraan.

"Pengosongan lapak PKL dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti mereka sudah tidak punya izin, dan kalau ada pembeli yang parkir sering memakan bahu jalan. Sehingga membuat macet di Jalan Abu Bakar Ali," pungkasnya. (gll/rid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005